

RENSTRA

TAHUN 2017 - 2022



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU
PEMERINTAH KOTA BATU



Jl. Panglima Sudirman No. 507
Gedung C Lantai 1
Balaikota Among Tani

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya jualan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2017–2022 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perhubungan Kota Batu dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Dinas Perhubungan Kota Batu memuat visi, misi, Walikota terpilih serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022. Renstra-SKPD Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2017-2022 disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Batu dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batu selama masa 5 (lima) Tahun kedepan.

Demikian Renstra-SKPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 2018
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Batu

Drs. SUSETYA HERAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660910 198809 1 001

Daftar Isi

Halaman Cover Laporan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DAN ANALISIS STRATEGIS	9
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya SKPD	11
2.2.1 Sumberdaya Manusia	11
2.2.2 Sumberdaya Lainnya	12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	17
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	20
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	22
BAB IV PERANGKAT DAERAH	24
4.1 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	26
5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	26
BAB VI STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	28
6.1 Strategi	28
6.2 Kebijakan	28

6.3 Analisis Kebijakan	32
BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB IX PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 82 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu.

Kedudukan SOPD Dinas Perhubungan, untuk selanjutnya disingkat “DISHUB” Kota Batu, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dinas Perhubungan merupakan bagian Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Batu mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2018-2022 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kota Batu 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan tim Penyusun renstra SKPD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra SKPD,

kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra SKPD dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai ketua tim, Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai Sekretaris Tim, Kasubag Penyusunan Progran dan Pelaporan sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan beranggotakan perwakilan dari masing-masing bidang, UPT dan Sekretariat.

Orientasi mengenai Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi : peraturan per Undang-Undangan perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya; teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu; dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim hingga penetapan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu. Adapun agenda kerja tersebut meliputi : persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra, penyesuaian rancangan renstra, penyampaian rancangan renstra, verifikasi rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan diakhiri dengan penetapan renstra.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti RT/RW Kota Batu, Renstra Kementerian Perhubungan serta

Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Batu, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara , keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Batu akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Batu yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batu.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu disusun melalui dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025
- i. Permendagri No 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- j. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2018-2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Batu untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2022 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Batu dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaranpembangunan daerah Kota Batu yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Batu Tahun 2018-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batu 2018-2022 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Batu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Batu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Batu yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Batu, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Batu, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan Kota Batu. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Batu ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Batu

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Batu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batu berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu dan/atau indikator lainnya seperti SDGs (Sustainable Development Goals) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASAHALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini faktor-faktor pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu dan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu.

BAB IV PERANGKAT DAERAH

- ### 4.1 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batu yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Batu.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Batu. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Batu beserta indikator kinerjanya.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batu Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batu dalam lima tahun mendatang.

BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Batu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Batu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IX PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan Kesimpulan dan beberapa rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perhubungan Kota Batu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

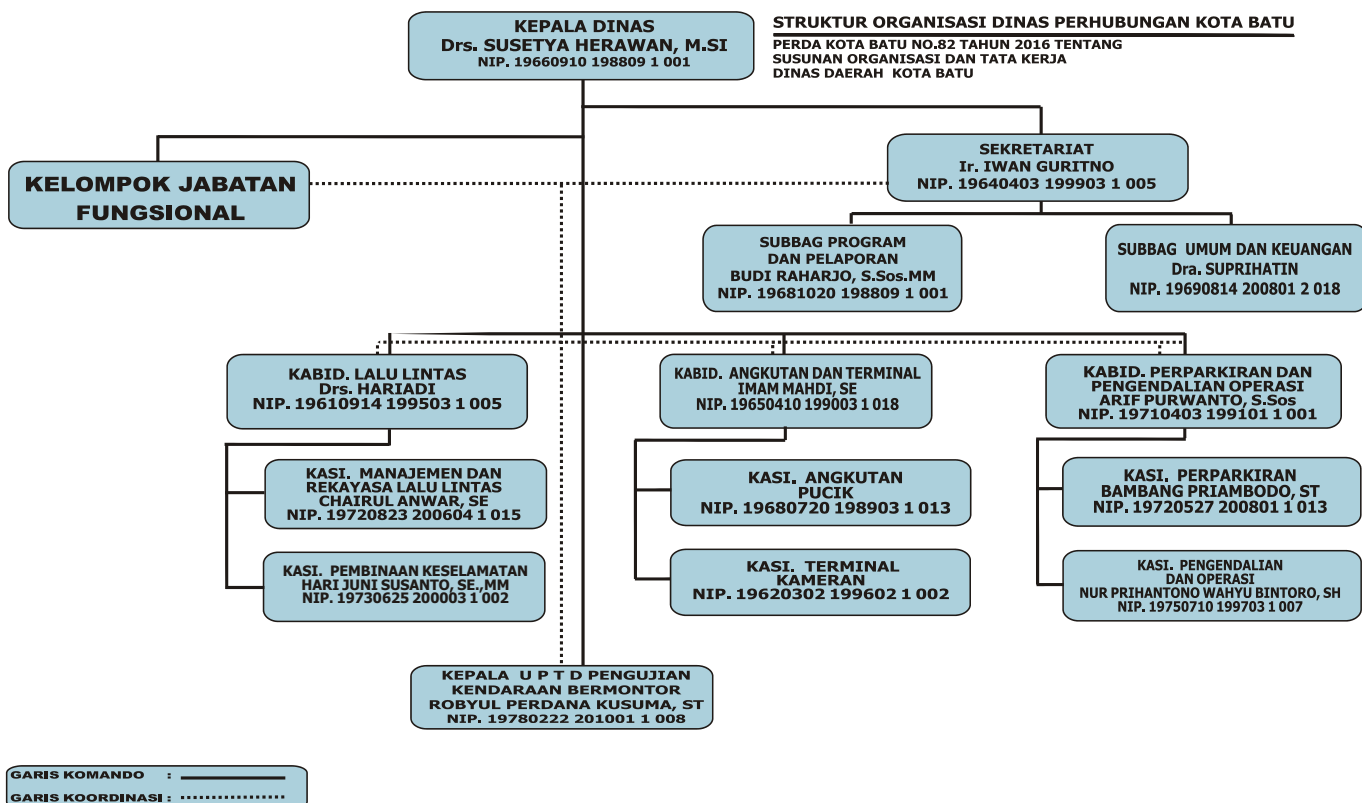
Pada pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kota Batu terdiri dari :

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batu



Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

Unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Pembinaan Keselamatan
4. Bidang Angkutan, membawahi:
 - a. Seksi Angkutan Orang
 - b. Seksi Angkutan Barang
5. Bidang Perparkiran & Pengendalian Operasi, membawahi :
 - a. Seksi Perparkiran
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasi
6. UPTD PKB

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Batu terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ aset.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Doktor (S-3)	0
2	Pasca Sarjana (S-2)	5
3	Sarjana (S-1)	27
4	Diploma (D-3)	2
5	Diploma (D-2)	0
6	S L T A	30
7	S L T P	3
8	S D	0
	JUMLAH	67

b. Jumlah Pegawai Yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

NO	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	SPAMEN	1
2	SPAMA	3
3	ADUM/ADUMLA	5
	JUMLAH	9

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	IV	5
2	III	28
3	II	32
4	I	2
5	Non PNS	11
	JUMLAH	78

d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Esselon II B (Kepala Dinas)	1
2	Esselon III A (Sekretaris)	1
3	Esselon III B (Kepala Bidang)	5
4	Esselon IV A (Kasubag/Kasie)	6
5	Esselon IV B (Kasubag Ka UPT)	1
6	Staf termasuk (PNS dan Non PNS)	64
	JUMLAH	78

2.2.2. Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Batu yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) yaitu :

1. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota.
2. Tersedianya Halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan Kota.
5. Tersedianya unit Pengujian Kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib minimal 1000 (seribu) kendaraan wajib uji.
6. Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Tersedianya SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.
8. Tercapainya Indek Kepuasan masyarakat dengan baik.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022 dan Proyeksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Dishub	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota				80%	82%	84%	86%	88%	80%	81%	83%	85%	87%	100%	95%	95%	95%	95%
2	Tersedianya halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek				85%	86%	87%	88%	90%	85%	86%	87%	88%	89%	100%	100%	100%	100%	99%
3	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek				50%	50%	50%	50%	50%	47%	47%	47%	47%	47%	95%	95%	95%	95%	95%
4	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) Kota				75%	76%	77%	78%	80%	75%	76%	77%	78%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji				90%	90%	90%	95%	100%	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor				85%	86%	87%	88%	90%	85%	86%	87%	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada				55%	55%	55%	55%	55%	55%	58%	61%	61%	61%	100%	105.6%	111%	111.11%	111.1%

	Kabupaten/Kota																		
8	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99.42 %	99.27 %	99.11 %	99.08 %	99.99 %	99.42 %	99.27 %	99.11 %	99.08 %	99.99 %

Adapun tingkat capaian penganggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Perhubungan Kota Batu, akan disajikan dalam tabel 2.2a dan 2.2b berikut ini:

tabel 2.2a

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan	2.830.000.000	2.830.000.000	2.830.000.000	2.830.000.000	2.830.000.000	600.000.000	700.000.000	710.000.000	712.000.000	715.000.000
Belanja Langsung	8.471.117.650	13.601.556.200	16.113.203.900	10.217.841.658	8.335.663.183	8.165.150.000	13.140.700.000	15.815.150.000	9.958.300.500	7.896.300.000
Belanja Tidak Langsung	5.832.951.469	5,949,610,498	6,068,602,708	6,189,974,763	6,313,774,258	5.803.000.000	5.936.210.000	6.014.200.000	6.064.130.000	6.123.320.500

tabel 2.2b

Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	21.20%	24.73%	25.09%	25.16%	25.27%	14.150.000.000	3.437.000.000
Belanja Langsung	96.39%	96.61%	98.15%	97.46%	94.73%	56.739.382.591	54.975.600.500
Belanja Tidak Langsung	99.49%	99.77%	99.10%	97.97%	96.98%	30.354.913.696	29.940.860.500

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kota Batu yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Batu maupun bagi *stakeholder* lainnya.

Tantangan yang mendominasi adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa ojek sepeda motor. Pada jarak menengah (kota) nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Batu mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini. Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh ada pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas (kelas angkutan umum eksekutif) dari angkutan massal (bus) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota Batu. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Sebagai salah satu tujuan wisata dari Provinsi Jawa Timur Kota Batu mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, pariwisata, perdagangan, hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada pelayanan sistem transportasi di Kota Batu.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan dan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	keselamatan lalulintas	Kemacetan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapasitas jalan kurang memadai ✓ Kendaraan besar (long vehicle) seperti bus yang masuk daerah perkotaan ✓ kurangnya jalan alternative
		Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kondisi topografi jalan yang berkelok dan naik turun ✓ Banyak hazard/resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan ✓ Pelanggaran terhadap aturan berlalulintas ✓ Kurangnya kesadaran para

			pengguna jalan
		Kesadaran pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada pendidikan keselamatan berlalulintas ✓ Keselamatan berlalulintas masih dianggap belum penting dan menjadi pokok permasalahan yang mendesak ✓ Kurangnya himbauan berlalulintas melalui media cetak maupun elektronik
2.	Regulasi tata kelola perparkiran	Aturan bagi hasil dan penetapan lahan parkir	<ul style="list-style-type: none"> ✓ system pembagian pendapatan antara juru parkir dengan Pemda ✓ Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya ✓ SK penentuan titik parkir serta jumlah juru parkir (KTA)
3.	Masih adanya angkutan umum yang tidak beroperasi serta kelangsungan hidup angkutan umum diambang kebangkrutan	Semakin besarnya jumlah angkutan pribadi di jalan raya baik roda 2 maupun roda 4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pelayanan angkutan umum masih dibawah standard

Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Batu. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Batu dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda dan Perwali) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan, menuntut adanya transparansi

dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kota Batu perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Batu senantiasa menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenaan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kota Batu di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
- 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
- 3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di kota Batu serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.

- 5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
 - a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu.
 - b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kota Batu kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.

Memperhatikan dan menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran pengemudi/pemilik kendaraan maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi;
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda transportasi lainnya;
5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan per-undang-undangan/*regulatory reform*) di bidang

transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama se-cara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, ka-wasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai.
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu yaitu :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat; pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kota Batu). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran sopir/juru mudi angkutan/kendaraan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah aq Dinas Perhubungan Kota Batu dengan pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan sektor transportasi serta Menyediakan prasarana dan sarana transportasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong peranan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan bidang transportasi. Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi.
2. Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta.

Setidaknya ada 2 point yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Batu, yaitu :

Peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan penyediaan sarana prasarana fasilitas jalan. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di

bidangnya. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Batu, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik pada pelaksanaan menghadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kota Batu yang mana Dinas Perhubungan Kota Batu terkait di dalamnya, yaitu :

- Pembangunan fasilitas parkir bersama /rest area yang memadai dan representatif
- Pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif
- Pengembangan strategi pengenaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di jalan di sekitar pusat kota

Faktor yang bisa menjadi penghambat dari beberpa point di atas diantaranya adalah : keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas PerhubunganKota Batu. Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Perhubungan kota Batu diantaranya : adanya payung hukum yang menjadi landasan untuk kebijakan pengenaan tarif berkenaan dengan pelayanan perhubungan di Kota Batu.

Pada kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Batu telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada juru mudi/sopir serta pemilik angkutan umum.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Batu dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Tingkat kemacetan yang perlu penanganan secara intens.
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi.
- Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian.

- Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Batu disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
- Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.
- Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.

BAB IV PERANGKAT DAERAH

4.1 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah Kota Batu yang diimplementasikan dalam Visi Kota Batu yaitu **“Desa Berdaya Kota Berjaya: Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdayasaing dan Sejahtera”** ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai tupoksi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Batu yaitu “melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan” maka salah satu tugas Dinas Perhubungan kota Batu yang terkait dengan visi Kota Batu tersebut adalah ikut serta mewujudkan tatakelola transportasi kota Batu yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Batu terkait visi Kota Batu tersebut yaitu “perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan juga penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan” diarahkan untuk terwujudnya kota Batu yang aman, nyaman di bidang transportasi dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendukung terwujudnya Visi kepala daerah harus didukung dan misi yang baik dari kepala daerah, adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal.
2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Pedesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

Mencapai tujuan dari misi kepala daerah diatas, maka dituangkan kedalam **Misi ke 4** Kota Batu yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Pedesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”** Keterkaitan Dinas

Perhubungan Kota Batu dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok nya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang aman dan nyaman serta merata di wilayah kota Batu dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Batu yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar terciptanya infrastruktur transportasi yang aman, nyaman, berwawasan lingkungan hijau secara merata.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan Misi Kota Batu diantaranya :

- Tidak seimbang nya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
- Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
- Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun traffic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.
- Peralatan *software* maupun *hardware ATCS (Area Traffic Control System)* yang sudah tua sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada kualitas layanan *traffic light*.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batu untuk mewujudkan visi misi Kota Batu yaitu :

Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum yang lebih intens lagi.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada upaya untuk ikut mensukseskan visi Kota Batu yaitu “**Desa Berdaya Kota Berjaya : Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera**”.

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Batu ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan antara lain :

1. Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.
2. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman.
3. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.
4. Aparat Dinas Perhubungan Kota Batu semakin handal.
5. Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi pada Dinas Perhubungan Kota Batu yaitu :

1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas
2. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman
3. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan
4. Meningkatkan aparatur yang profesional dan handal

Tabel T-C.25

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkualitas untuk mendukung penataan Infrastruktur yang terpadu		Tingkat pelayanan jalan	0.70<(V/C)<0.80	0.70<(V/C)<0.80	0.70<(V/C)<0.80	0.70<(V/C)<0.80	0.70<(V/C)<0.80
		meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Cakupan panjang jalan yang dilengkapi sarana prasarana alat perlengkapan jalan yang berfungsi baik	76%	78%	80%	82%	84%
			prosentase pengelolaan parkir yang baik sesuai ketentuan	72%	75%	77%	80%	82%
			persentase tertib berlalulintas	0%	75%	78%	80%	83%
		meningkatnya kualitas angkutan umum	persentase angkutan umum yang berkualitas baik dan laik jalan	80%	81%	82%	83%	84%

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
2. Mengoperasikan angkutan umum yang aman, nyaman dan relatif terjangkau dapat menarik kembali pengguna transportasi umum yang sempat beralih ke kendaraan pribadi (khususnya sepeda motor). Selain kenyamanan tidak kalah pentingnya adalah faktor keselamatan, maka faktor kelaikan kendaraan menjadi faktor penting untuk disikapi dengan melengkapi perangkat pengujian kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang / pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
4. Mengirimkan aparat Dinas Perhubungan Kota Batu untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

6.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, yaitu :

1. Manajemen Lalu lintas

Lalu lintas di kota Batu akan terus berkembang dengan cepat, tidak memungkinkan mengakomodasi pertumbuhan dengan membangun jalan-jalan baru. Untuk itu perlu diterapkan langkah-langkah manajemen lalu lintas yang baik untuk memanfaatkan prasarana jalan dengan optimal. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan optimasi penggunaan prasarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam manajemen lalu lintas antara lain :

1.1 Manajemen kapasitas

Adalah menggunakan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan persyaratan utama dengan cara :

- (a) Peningkatan kapasitas persimpangan jalan dengan cara melakukan perbaikan geometrik persimpangan dengan membuat pulau-pulau lalu lintas.
- (b) Peningkatan kapasitas ruas jalan dengan cara melakukan penertiban penggunaan daerah manfaat jalan dari aktifitas pedagang kaki lima (PKL), pemisahan jenis kendaraan, dan pengendalian parkir di badan jalan (on street parking) diatur tempat, posisi dan waktu.
- (c) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan melakukan pembatasan tempat membelok (turning movement), sistem jalan satu arah, tidak flow dan koordinasi lampu lalu lintas (ATCS).

1.2 Manajemen permintaan (*demand*)

Langkah yang dilakukan dalam manajemen permintaan adalah :

- (a) Merubah rute kendaraan angkutan umum
- (b) Merubah moda dari angkutan pribadi ke moda angkutan umum
- (c) Kebijaksanaan parkir dengan melarang parkir pada daerah tertentu atau jalan tertentu di pusat kota.
- (d) Intelegent Transport System (ITS) yaitu memberikan informasi kepada pengguna jasa tentang kondisi lalu lintas melalui media elektronik/internet, alat yang dipasang pada kendaraan, dan papan elektronik yang dipasang pada lokasi/jalan tertentu yang dapat memberikan gambaran situasi arus lalu

lintas secara nyata sehingga pengguna jasa transportasi dapat dengan mudah memilih rute.

- (e) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan three in one (3 in 1) dan memberlakukan road pricing pada jalan-jalan tertentu.
- (f) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dengan penerapan dilarang berbelok untuk memasuki suatu gedung/tempat dan lainnya (penutupan jalan).

1.3 Manajemen prioritas

- (a) Membuat lajur khusus angkutan umum.
- (b) Membuat jalur khusus sepeda
- (c) Membuat/membangun trotoar yang dapat digunakan untuk penderita cacat / orang tua.
- (d) Memasang audio tactile pada tiang lampu lalu lintas yang berguna bagi tuna netra untuk menyebrang jalan baik di persimpangan maupun ruas jalan.
- (e) Membuat daerah khusus digunakan untuk pejalan kaki, di mana kendaraan pribadi dilarang untuk memasukinya.

2. *Manajemen Angkutan Umum*

Kebijakan dan strategi transportasi untuk jangka menengah dan panjang di bidang angkutan umum adalah :

- (a) Memberikan jalur khusus angkutan umum untuk melalui suatu kawasan / ruas jalan tertentu di mana kendaraan pribadi dilarang untuk memasukinya.
- (b) Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum yang terdiri dari jenis pelayanan dan rute pelayanan sejalan dengan pertumbuhan kota yang direncanakan.
- (c) Pengaturan dan perijinan trayek angkutan umum, pemerintah secara progresif akan membebaskan pengaturan dan perijinan trayek untuk memajukan sistem angkutan umum yang efisien.

3. *Manajemen Angkutan Barang*

Pengendalian pergerakan angkutan barang dalam kota bertujuan untuk mengendalikan waktu penggunaan ruang jalan agar tidak bersama-sama dengan perjalanan masyarakat kota pada periode waktu sibuk, pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan lingkungan dari kerusakan, penentuan lokasi parkir untuk berhenti di

pinggir jalan dan penentuan waktu dan lokasi untuk kegiatan bongkar muat barang atau perlu diberlakukan kebijakan system logistic di Kota Batu.

4. *Manajemen Terminal*

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, yaitu tempat untuk naik turun penumpang dan bongkar muat barang, pengendalian lalu lintas kendaraan umum serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, meskipun terminal dikota batu diambil alih oleh propinsi jawa timur tetapi koordinasi dengan jurumudi/sopir maupun pengelola angkutan umum tetap dilaksanakan karena berada diwilayah kota batu.

5. *Manajemen Tata Ruang*

5.1 Penetapan tata ruang

Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi kota sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata ruang kota dan kota penyangga. Penataan berbagai pusat kegiatan dan pemukiman serta kepentingan masyarakat kota secara tepat dan baik akan membantu memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara baik.

5.2 Penyebaran pusat kegiatan

Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di wilayah kota dapat membantu menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota tertentu, dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan.

6. *Manajemen Lingkungan*

Kualitas udara di daerah perkotaan sangat rendah, dengan tingkat pencemaran udara yang cenderung tinggi. Kendaraan bermotor memberikan kontribusi penting bagi berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, polusi kebisingan, polusi getaran dan lainnya. Untuk mengatasi ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- (a) Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini) dilakukan pengujian kendaraan setiap enam bulan sekali.
- (b) Menetapkan ambang batas gas buang kendaraan
- (c) Mengurangi kadar timbal dalam bahan bakar minyak
- (d) Penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar gas
- (e) Melarang kendaraan berat memasuki perumahan / pemukiman
- (f) Penegakan hukum yang berlaku.

7. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di lapangan. Langkah langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
- b. Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum
- c. Meningkatkan kualitas petugas operasional
- d. Memberdayakan kualitas sekolah mengemudi
- e. Memperketat seleksi untuk memperoleh SIM
- f. Menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

6.3 Analisis Strategi

Strategi adalah alat mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi ini terus berkembang seiring dengan perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat.

1. Analisis Swot

Salah satu teori pemilihan strategi yang “tepat” untuk suatu organisasi adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) yang disebut analisis SWOT.

Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan Kota Batu juga telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*streight*) dan peluang (*opportuniteis*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

a. Membuat Matriks SWOT

Mengelompokkan variabel berdasarkan pernyataan-pernyataan terpilih :

<p>KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Batu yang berjumlah 79 orang. 2. Adanya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan 3. Adanya Komitmen Pimpinan 4. Sarana dan Prasarana 	<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan yang telah memadai 2. Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat 3. Adanya Kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat
<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi teknis pegawai yang tidak seimbang 2. Keterbatasan pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya 3. Keterbatasan anggaran Pemerintah 4. Profesionalisme pegawai yang belum memadai 	<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penduduk Kota Batu yang semakin tinggi 2. Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kota Batu 3. Macet 4. Pusat Aktivitas belum merata

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Desa Berdaya Kota Berjaya terwujudnya Kota Batu sebagai sentra Agrowisata Internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera		
MISI 4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkualitas untuk mendukung penataan infrastruktur yang terpadu	meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik sesuai standar	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan ✓ Merencanakan serta melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang rusak atau menambah sesuai dengan kebutuhan

		meningkatkan kualitas juruparkir	Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam penataan parkir ✓ melakukan operasi penertiban parkir ditepi jalan umum ✓ melakukan pembinaan kepada juru parkir
		Pengendalian dan operasi kendaraan angkutan umum dijalan raya	Penertiban angkutan umum dijalan raya ✓ Pemeriksaan alat kelengkapan kendaraan angkutan umum dijalan raya ✓ Sosialisasi penggunaan fasilitas jalan
	meningkatnya kualitas angkutan umum	1. meningkatkan kordinasi dengan pengusaha angkutan umum dan organda 2. melaksanakan sosialisasi pada pengusaha dan juru mudi angkutan umum dalam trayek 3. meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Meningkatkan pelayanan uji kir pada angkutan umum dalam trayek dan tdk dalam trayek ✓ Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan perencanaan jaringan trayek pada angkutan umum yang ada ✓ Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat Kota Malang, baik melalui media cetak dan elektronik, maupun melalui penyuluhan yang diselenggarakan secara langsung kepada pengguna jalan

BAB VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya.

Beberapa kelompok sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batu 2017-2022 dan kelompok sasaran yang mendukung Janji Walikota, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas alat kelengkapan jalan;

Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai berikut :

Program Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan kegiatan pendukungnya adalah :

- Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lalulintas jalan, dengan indikator kinerja : jumlah sarana prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kondisi baik dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 34.215.505.100,-

2. Meningkatnya kualitas angkutan umum;

Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai berikut :

Program Peningkatan pelayanan angkutan, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :

- Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor, dengan indikator jumlah kendaraan angkutan umum yang wajib uji, dengan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 3.721.268.241,-
- Sosialisasi peningkatan keselamatan penumpang, dengan indikator kinerja : jumlah jumlah pemilik & sopir angkutan umum yang memahami pentingnya keselamatan berlalulintas , dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 854.222.000,-
- Penentuan titik lokasi terminal tipe C dengan indicator kinerja : jumlah dokumen analisis tentang kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu, dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 124.000.000,-
- Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan, dengan indikator Jumlah sopir yang mendapatkan

penghargaan, dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 410.000.000,-

- Kegiatan pemeliharaan tempat pemberhentian angkutan umum dengan indikator jumlah tempat pemberhentian angkutan umum, dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 394.398.500,-
- Review tataran transportasi local dengan indicator jumlah dokumen kajian tataran transportasi perhubungan darat, dengan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun kedepan sebesar Rp. 300.000.000,-

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tahun 2018																			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	1.634.740.960	100%	1.718.826.900	100%	1.683.826.400	100%	1.713.626.400	100%	1.893.626.400	100%	1.893.626.400		
		2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan prangko yang	320lb, 300lb,29 surat, 5kg	320lb, 300lb, 29 surat,	9.696.400	550lb, 450lb, 300 12kg	10026400	550lb, 450lb, 300 12kg	10026400	550lb, 450lb, 300 12kg	10026400	550lb, 450lb, 300 12kg	10026400	550lb, 450lb, 300 12kg	10026400	Dinas Perhubungan	Kota Batu

				tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat		5kg													
		2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	50 orang	50 orang	1.275.705.720	50 orang	1.285.500.000	54 orang	1.285.500.000	54 orang	1.285.500.000	54 orang	1.285.500.000	54 orang	1.285.500.000	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09.2.09.01.08	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	1 orang tenaga kebersihan	1 orang tenaga kebersihan	2100000	1 orang tenaga kebersihan	2100000	1 orang tenaga kebersihan	2100000	1 orang tenaga kebersihan	2100000	1 orang tenaga kebersihan	2100000	1 orang tenaga kebersihan	2100000	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09.2.09.01.09	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan	Jumlah Peralatan yang dirawat dan	perbaikan 10 laptop dan 24 komputer	perbaikan 10 laptop dan 24	1884000	perbaikan 10 laptop dan 24	1884000	perbaikan 10 laptop dan 24	2000000	perbaikan 10 laptop dan 24	2000000	perbaikan 10 laptop dan 24	2200000	perbaikan 10 laptop dan 24	2200000	Dinas Perhubungan	Kota Batu

			Kerja	diperbaiki dg tepat	serta printer 20 unit	kompu ter serta printer 20 unit		kompute r serta printer 20 unit		kompute r serta printer 20 unit		komput er serta printer 20 unit		komput er serta printer 20 unit		komputer serta printer 20 unit			
		2.09 .2.09.1 .01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksana ya penyediaan alat tulis kantor	45 Jenis alat tulis	46 jenis alat tulis	5049 6200	46 jenis alat tulis	545000 00	50 jenis alat tulis	5500000 0	45 jenis alat tulis	5600000 0	46 jenis alat tulis	5600000 0	46 jenis alat tulis	5600000 0	Dinas Perhubung an	Kota Batu
		2.09 .2.09.1 .01 . 11	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	6 jenis barang cetak dan penggandaan	6 jenis barang cetak dan penggandaan	1015 3650 0	6 jenis barang cetak dan penggandaan	100500 000	7 jenis barang cetak dan penggandaan	1000000 00	6 jenis barang cetak dan penggandaan	1000000 00	6 jenis barang cetak dan penggandaan	1000000 00	6 jenis barang cetak dan penggandaan	1000000 00	Dinas Perhubung an	Kota Batu
		2.09 .2.09.1 .01 . 12	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Pener. Bangunan Kantor	4 jenis alat listrik dan elektronik	9 jenis alat listrik dan elektronik	8897 000	9 jenis alat listrik dan elektronik	889700 0	9 jenis alat listrik dan elektronik	10,200,0 00	12 jenis alat listrik dan elektronik	11,000,0 00	12 jenis alat listrik dan elektronik	11,000,0 00	12 jenis alat listrik dan elektronik	11,000,0 00	Dinas Perhubung an	Kota Batu
		2.09 .2.09.1 .01 . 13	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan kelengkapan	1 tenda pantau, 3 komputer , 3 printer	1 unit tirai	14,25 6,000	3 buah laptop	80,000, 000	2 buah laptop	36,000,0 00	4 buah compute r	60,000,0 00	2 comput er, 3 almari	60,000,0 00	2 computer , 3 almari	60,000,0 00	Dinas Perhubung an	Kota Batu

				n kantor															
		2.09 .2.09.1 .01 . 14	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	11 jenis peralatan dan bahan keber	12 jenis peralat an dan bahan kebersihan	15,24 9,000	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	15,249, 000	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	16,300,0 00	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	17,000,0 00	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	17,000,0 00	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	17,000,0 00	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09 .2.09.1 .01 . 15	Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	2 macam bahan bacaan/k oran	3 macam bahan bacaan /koran	7,304 ,640	3 macam bahan bacaan/k oran	8,500,0 00	4 macam bahan bacaan/ koran	8,800,00 0	4 macam bahan bacaan/ koran	9,100,00 0	3 macam bahan bacaan/ koran	9,100,00 0	3 macam bahan bacaan/k oran	9,100,00 0	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09 .2.09.1 .01 . 16	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan makan dan minum harian pegawai	6 jenis bahan logistic	6 jenis bahan logistik	19,81 4,500	6 jenis bahan logistik	19,814, 500	6 jenis bahan logistik	21,000,0 00	6 jenis bahan logistik	21,500,0 00	6 jenis bahan logistik	21,500,0 00	6 jenis bahan logistik	21,500,0 00	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09 .2.09.1 .01 . 17	Penyedia Makanan dan Minuman	jumlah ketersedian mamin aparatur	2 jenis makanan rapat, lapangan dan tamu	4 jenis makanan rapat, lapangan dan tamu	26,00 0,000	4 jenis makana rapat, lapangan dan tamu	26,000, 000	4 jenis makana rapat, lapangan dan tamu	28,000,0 00	4 jenis makana rapat, lapangan dan tamu	29,000,0 00	4 jenis makana rapat, lapangan dan tamu	29,000,0 00	4 jenis makanan rapat, lapangan dan tamu	29,000,0 00	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09 .2.09.1 .01 .	Rapat2 Koord. Dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi	92 rapat koordinasi	110 rapat koordinasi	59,94 5,000	110 rapat koordinasi	64,000, 000	125 rapat koordinasi	65,000,0 00	120 rapat koordinasi	66,000,0 00	115 rapat koordinasi	66,000,0 00	155 rapat koordinasi	66,000,0 00	Dinas Perhubungan	Kota Batu

		18	ke luar Daerah	dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri		nasi		si		asi		asi		asi					
		2.09 .2.09.1 .01 .19	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	65 perjalanan dinas	78 perjalanan dinas	6,000,000	78 perjalanan dinas	6,000,000	78 perjalanan dinas	7,000,000	78 perjalanan dinas	7,500,000	78 perjalanan dinas	7,500,000	78 perjalanan dinas	7,500,000	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09 .2.09.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan	100%	100%	39713800	100%	358500000	100%	276000000	100%	263000000	100%	363000000	100%	363000000	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09 .2.09.02.12	Pengadaan Alat-alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang tersedia untuk kelancaran operasional	01 jenis alat komunikasi	1 jenis alat komunikasi	150,000,00	1 jenis alat komunikasi	0	-	15,000,000	2 jenis alat komunikasi	0	-	0	--	0	Dinas Perhubungan	Kota Batu
		2.09 .2.09.	Pemeliharaan rutin /	Jumlah Kendaraan	-	1 kendar	30,88	1 kendar	33,200,	1 kendar	34,000,0	1 kendar	35,000,0	1 kendar	35,000,0	1 kendar	35,000,0	Dinas Perhubungan	Kota Batu

		02. 23	berkala kendaraan dinas Jabatan	Dinas Operasional yang mendapatka n perawatan dan perbaikan tepat waktu		aan jabata n	8,000	an jabatan	000	an jabatan	00	an jabatan	00	an jabatan	00	n jabatan	00	an	
		2.09 . 2.09. 02. 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/opera sional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatka n perawatan dan perbaikan tepat waktu		Roda dua 15 unit, Roda empat 4 unit	216,2 50,00 0	Roda dua 20 unit, Roda empat 6 unit	225,30 0,000	Roda dua 20 unit, Roda empat 6 unit	227,000, 000	Roda dua 20 unit, Roda empat 6 unit	228,000, 000	Roda dua 20 unit, Roda empat 6 unit	228,000, 000	Roda dua 20 unit, Roda empat 6 unit	228,000, 000	Dinas Perhubung an	Kota Batu
			Pemeliharaa n rutin/berkal a gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara dengan baik	-	-	0	1 gedung	100000 000	-	0	-	0	1 gedung	1000000 00	1 gedung	1000000 00	Dinas Perhubung an	Kota Batu
		2.09 .2.09.1 . 03	Program Peningkata n Disiplin Aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi disiplin	100%	100%	112.0 08.00 0	100%	49.800. 000	115.000. 000	100%								
		2.09.2. 09.01.	Pengadaan Pakaian	jumlah sarana	-	63 orang	58,88	-	-	-	-	63 orang	-	-	-	-	-	Dinas Perhubung	Kota Batu

		03.03	Dinas Beserta Perlengkapannya	pendukung pelayanan aparatur			8,000			00							an		
		2.09.2.09.01.03.04	Pengadaan Pakaian kerja lapangan	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur yang tersedia	20 orang	20 orang	53,120,000	83 orang	49,800,000	-	20 orang	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	Kota Batu	
		2.09.2.09.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	100%	100%	6198000	100%	5400000	100%	5500000	100%	6200000	100%	6200000	100%	6200000		
		2.09.2.09.1.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang meningkatkan kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	23 orang	40 Orang	61,980,000	40 Orang	54,000,000	36 Orang	38 Orang	62,000,000	40 Orang	62,000,000	40 Orang	62,000,000	Dinas Perhubungan	Kota Batu	
		2.09.2.09.1	Program Peningkatan	% jumlah aparatur		100%	1500000												

		aan Sarana Prasarana Perhubungan	perlengkapan jalan												
		Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas jalan	jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik	5	7.060.646.600	10	11.885.000.000	2 traffic light ATCS, 3 unit cctv dan Bandwidth internet, 80 unit rambu, 5 traffic light, 17 cermin, lokasi cctv,	5.925.000.000	9	3.639.400.000	9	3.639.400.000	Bidang lalu lintas dan Bidang P2O	Kota batu
				warning light, 2 Traffic light ATCS, 3 unit cctv dan Bandwidth internet, 1 paket video wall, 1 paket perencanaan, 60 unit rambu, 5 traffic light, 17 cermin, 17 lokasi cctv,		Display VMS (variable message send, 2 traffic light ATCS, 3 unit cctv dan Bandwidth internet, 1 paket guide for transportation, 70 unit rambu, 5 traffic light, 17 cermin,		2 traffic light ATCS, 3 unit cctv dan Bandwidth internet, 80 unit rambu, 5 traffic light, 17 cermin, lokasi cctv, rambu, 10 cermin, 10 RPPJ		warning light, 3 PCTL, 3 unit cctv dan Bandwidth internet, 100 unit rambu, 5 traffic light, 17 cermin, 17 lokasi cctv, 100 rambu, 10 cermin, 10 RPPJ		warning light, 3 PCTL, 3 unit cctv dan Bandwidth internet, 100 unit rambu, 5 traffic light, 17 cermin, 17 lokasi cctv, 100 rambu, 10 RPPJ			

						100 rambu, 20 cermin, 10 RPPJ10 warning portable laporan	255.48 3.500		17 lokasi cctv, 100 rambu, 10 cermin, 10 RPPJ laporan	270.000. 000	laporan	280.000. 000	laporan	290.000. 000	laporan	290.000. 000	Bidang lalulintas	Kota batu
		Sistem Informas rana prasarana perhubunga n untuk keselamatan berlalu Kegiatan pembinaan juru parkir	Jumlah informasi dan data base sarana prasarana perhubunga n Juru parkir yang memiliki KTA			250 jukir	150.00 0.000	250 jukir	150.000. 000	250 jukir	150.000. 000	250 jukir	150.000. 000	250 jukir	150.000. 000	Bidang parkir dan dalops	Kota batu	
		Kegiatan operasi penertiban parkir kendaraan bermotor Penyusunan kajian perubahan perda	Jumlah potensi titik parkir Jumlah dokumen kajian yang dikeluarkan			116 titik parkir	120.00 0.000	116 titik parkir	125.000. 000	116 titik parkir	130.000. 000	116 titik parkir	135.000. 000	116 titik parkir	135.000. 000	Bidang parkir dan dalops	Kota batu	
				1 dokum en	349.3 75.00 0											Bidang parkir dan dalops	Kota batu	

			Kegiatan penertiban laik jalan kendaraan dijalan raya	Jumlah kendaraan angkutanya ng laik jalan				1 unit mobil Derek, 4 kali operasi	1.600.000.000	4 kali operasi penertiban	100.000.000	4 kali operasi penertiban	100.000.000	4 kali operasi penertiban	100.000.000	Bidang parkir dan dalops	Kota batu	
			Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan bermotordijalan	Jumlah pengendalian kendaraan bermotor dan pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas jalan			12 bulan	275.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	Bidang parkir dan dalops	Kota batu
		2.09	Program	% Rasio	75%	80%			466.4									
	Meningkatnya kualitas angkutan umum	.2.09.1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	kendaraan angkutan umum yang melayani masyarakat					52.400									
		.17																
		2.09	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk peningkatkan	Jumlah sopir angkutan umum yang memahami pentingnya	270 orang	356 orang sopir/juru mudi		129,222,000								Bidang angkutan	Kota batu	

		Sosialisasi keselamatan penumpang	sopir dan pengelolaan angkutan umum yang memahami pentingnya keselamatan lalu lintas		orang	2.000	orang	000	orang	000	orang	000	orang	000	angkutan	batu
		Kajian lokasi titik terminal tipe C	Jumlah peningkatan jaringan trayek & terminal tipe C yang mencakup wilayah kota batu		1 dokumen	50.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	Bidang angkutan	Kota batu
		Kegiatan dan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/awak kendaraan angkutan umum	Jumlah sopir yang mendapatkan penghargaan	250 orang	225 orang	95000000	200 orang	100000000	175 orang	105000000	150 orang	110000000	150 orang	110000000	Bidang angkutan	Kota batu
		Pemeliharaan tempat-	Jumlah tempat		6 halte	94.398.500	6 halte	100.000.000	6 halte	100.000.000	6 halte	100.000.000	6 halte	100.000.000	Bidang angkutan	Kota batu

		laik jalan kendaraan dijalan raya	angkutanya ng laik jalan			Derek, 4 kali operasi		penertiban		penertiban		penertiban		penertiban		dalops	
		Kegiatan sosialisasi bagi pengguna fasilitas jalan	Jumlah masyarakat pengguna fasilitas jalan			12 kali	275.000.000	12 kali	300.000.000	12 kali	325.000.000	12 kali	350.000.000	12 kali	350.000.000	Bidang parkir dan dalops	Kota batu

Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		209.2.09.01.01.03	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat						100%	3,314,852,820.	100%		100%					
		209.2.09.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan						Mamin Rapat, penjilitan, foto copy	10.000.000								
		209.2.	Penyusunan	Jumlah						Penggad	5.000.00								

		09.01. 01.02	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	dokumen Pelaporan					aan	0							
		209.2. 09.01. 01.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	jumlah barang dan jasa perkantoran perangkat daerah yang tersedia					materai 3000 materai 6000 dan kiriman kilat ,paket , honorari um tenag administ rasi , tenaga kebersih an lorg, perbaika n 10 laptop, 24 PC & printer, 50 jenis ATK, 4	1.865.86 8.220							

									jenis cetak pengan daan, alat listrik, peralatan & bahan pembersih, 4 jenis mamin, 110 rapat keluar daerah dan 78 rapat dalam daerah								
		209.2.09.01.01.04	Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana kedinasan daerah	jumlah aparatur yang menjadi disiplin					Pengadaan pdh, diklat pim, diklat teknis perhubungan, bimtek	66.600.000							

									an roda 2, belanja lemari arsip, belanja laptop, belanja compute r pc, belanja printer,b elanja camera,									
Meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkualitas untuk mendukung penataan infrastruktur yang terpadu	Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum	209.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik dan laik jalan	80%				81%	463.090.155	82%		83%		84%			
		209.2.09.01.17.01	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	peningkatan pelayanan uji KIR kendaraan bermotor demi keselamatan berlalulintas					belanja atk, belanja alat kebersihan, belanja bahan bakar	322.125.050								

									minyak, belanja bahan baku banguna n, belaja jasa kebersih an, belanja jasa keaman a, belanja cetak penggad aan, mamin rapat, belanja perjalan an dinas								
209.2. 09.01. 17.03	Sosialisasi keselamatan penumpang	peningkatan pemahaman kepada juru mudi dan pemilik angkutan umum							Honorar ium non pns, belanja atk, cetak, penggad aan,	31.691.2 00							

									sewa uang rapat, mamin, transpor tasi,								
		209.2. 09.01. 17.09	Pemeliharaan tempat pemberhentian angkutan umum	pemeliharaan sarana prasarana perhubungan					pemeliharaan halte	4868365 5							
			Forum Lalu lintas							6059025 0							
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas perhubung an		209.2. 09.01. 19	Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas jalan	Cakupan panjang jalan yang dilengkapi sarana prasarana alat perlengkapan jalan yang berfungsi baik					78%	2.713.57 8.670	80%		82%		84%		
		209.2. 09.01. 19.01	Peningkatan dan pemeliharaan sarana	pemeliharaan dan pembangunan sarana					3 warning light, 1 bandwit	2.535.13 4.170							

			prasarana lalulintas jalan	prasarana perhubunga n					h cctv, 100 rambu standart, 25 Cermin cembun g, 12 rambu F/RPPJ, 39 papan nama jalan, 1 CCTV, Pemelih araan traffic/w arning light 20 buah lampu aspek warning, 6 unit lampu aspek traffic light dan Pemelih								
--	--	--	----------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

									raaan rutin CCTV 13 lokasi 21 camera, Pengeca tan marka jalan 540 m2, Penamb ahan Marka Jalan 650 m2									
209.2. 09.01. 19.03	Sistem informasi sarana prasarana perhubunga n untuk keselamatan berlalu lintas	informasi sarana perhubunga n								178.444. 500								
209.2. 09.01. 20	Progran penataan dan pembinaan parkir dan								75%	462.232. 500	77%		80%		82%			

		pengendalian operasi																
		209.2. 09.01. 20.01	Kegiatan pembinaan juru parkir	pembinaan juru parkir agar lebih profesional						belanja pakian untuk parkir rompi dan topi lapangan	84.850.000							
		209.2. 09.01. 20.03	Kegiatan Operasi penertiban parkir kendaraan bermotor	penertiban parkir						honorarium, belanja cetak, belanja mamin operasional kegiatan	14.8212.500							
		209.2. 09.01. 20.05	Penertiban laik jalan kendaraan umum dijalan raya	pelayanan untuk keselamatan berlalulintas						honorarium, belanja cetak, belanja mamin operasional kegiatan .belanja	20.3916.000							

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batu yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022, yaitu :

NO	IKU	KONDISI KERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kualitas alat perlengkapan jalan	75	76	78	80	82	84	84
2.	Meningkatnya tata kelola parkir	70	72	75	77	79	81	81
3.	Meningkatnya pengendalian operasi lalulintas	0	0	75	78	80	83	83
4.	Meningkatnya kualitas angkutan umum	78	80	81	82	83	84	84

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Batu yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas alat perlengkapan jalan
2. Meningkatkan kualitas angkutan umum
3. Meningkatkan tatakelola parkir
4. Meningkatkan pengendalian operasi lalulintas

**RENCANA TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2017-2022**

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Persentase ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	76%	75%	78%	77%	80%	79%	82%	80%	84%	82%
2.	Persentase kendaraan angkutan umum yang melayani masyarakat dalam kondisi baik	80%	78%	81%	80%	82%	81%	83%	82%	84%	83%
3.	Persentase pelanggan perparkiran ditempat larangan parkir	72%	72%	75%	75%	77%	77%	80%	80%	82%	83%
4.	Persentase penertiban kendaraan di jalan raya	0%	0%	75%	76%	78%	79%	80%	80%	83%	82%

BAB IX

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batu 2017-2022 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2017 – Tahun 2022, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Batu dalam periode 2017 – 2022. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas Perhubungan. Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Untuk sempurnanya pencapaian kinerja program-program pembangunan Dinas Perhubungan periode 2017 – 2022, masih ditemui adanya permasalahan dan hambatan, namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama periode 2012 – 2017, tersebut senantiasa selalu diupayakan untuk mencari solusinya. Permasalahan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batu adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak seimbang antara system jaringan (supply) dan system pergerakan (demand), pertumbuhan rata-rata kendaraan per tahun dengan jaringan jalan, idealnya sebuah kota mempunyai jalan 20 % dari luas lahannya.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sektor transportasi dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan, masih dihadapkan pada terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, sehingga masih dijumpai beberapa kondisi prasarana dan sarana yang kurang mendapatkan perawatan, terutama alat kelengkapan jalan.